



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
2025-2029

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Dokumen ini dirancang untuk memformulasikan program dan kegiatan strategis Dinas sebagai turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pembangunan lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini memiliki peran penting sebagai pedoman strategis bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam mewujudkan tata kelola informasi dan statistik yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Renstra ini mencerminkan komitmen kami untuk mendukung visi "Energi Baru 2025-2029," yang menekankan penguatan daya saing, inovasi, pengelolaan data berbasis digital, serta pelayanan prima kepada masyarakat. Dokumen ini sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, peningkatan literasi data, serta pengelolaan statistik berbasis digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu.

Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan tantangan global, seperti perkembangan teknologi informasi, transformasi digital, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta kebutuhan lokal terkait penguatan infrastruktur komunikasi di wilayah kepulauan. Dokumen ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan pembangunan, mendukung inovasi di bidang komunikasi dan statistik, serta memberikan solusi atas berbagai hambatan operasional yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah. Pada akhirnya, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai



fondasi dalam memperkuat integrasi sistem informasi dan statistik menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, data, maupun gagasan strategis. Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan kerja yang efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap, dokumen ini dapat menjadi landasan kokoh untuk mewujudkan kinerja Dinas yang semakin baik dan inovatif di masa depan.

Tarempa, 15 September

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



JAPRIZAL, S.Kom., M.A.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750120 200312 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah	18
a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan	19
b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan	20
2.1.b.ii Sumber Daya Aset	23
2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23).....	28
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	28
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	35
2. Peluang.....	36
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	38
2.2.a Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39
2.2.b Isu Strategis	42
BAB III	46
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3. 1. Tujuan Renstra PD.....	46
3.2 Sasaran Renstra	48
a. Tujuan Strategis.....	49
3. 4 Arah Kebijakan:	51



BAB IV.....	69
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	69
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB V	92
PENUTUP.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan 19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital dan globalisasi, peran komunikasi, informasi, dan statistik di daerah menjadi kunci dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis pada data dan teknologi. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) memegang tanggung jawab strategis terkait infrastruktur komunikasi, pengelolaan informasi, serta layanan statistik yang berkualitas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Ketiga aspek ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sistem informasi dan data statistik yang andal membuat pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang akurat, memantau pelaksanaan program secara real-time, serta mengevaluasi keberhasilan pembangunan secara transparan.

Pentingnya perencanaan pembangunan untuk menjamin pembangunan berjalan efektif, efisien, dan terarah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Dalam kerangka ini, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi dokumen perencanaan penting bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Renstra disusun untuk jangka waktu lima tahun dan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan strategis yang dirancang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Sebagai dokumen yang bersifat indikatif, Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen tahunan yang memuat langkah-langkah operasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sinergi dan keterpaduan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan menjadi elemen penting untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. RPJPD menetapkan visi strategis pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, sementara RPJMD menjadi turunan operasional dengan prioritas pembangunan selama lima tahun. RKPD, sebagai dokumen tahunan, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap berada dalam kerangka besar RPJPD dan RPJMD. Sinergi tersebut juga meliputi keselarasan antara perencanaan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, menciptakan harmoni kebijakan untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien di semua tingkatan.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas merujuk pada visi "Energi Baru 2025-2029," yang menekankan penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi layanan komunikasi, informasi, dan statistik berbasis data. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan RPJMD dan memiliki dampak yang terukur. Indikator dan target yang jelas dalam Renstra memberikan landasan yang kuat bagi evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan, sehingga proses



perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan efisien.

Dengan tersusunnya Renstra ini, Diskominfotik diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung tata kelola informasi dan statistik yang transparan dan inovatif. Penyusunan Renstra yang berkualitas juga diharapkan menciptakan koordinasi yang lebih baik antar sektor, menghindari tumpang tindih program, dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Melalui sinergi yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, implementasi Renstra ini akan menjadi langkah konkret menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



- Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
 21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas yang selaras dengan isu-isu strategis di bidang komunikasi, informatika, dan statistik, termasuk penguatan infrastruktur teknologi informasi, literasi digital, dan pengelolaan data berbasis bukti.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional, sehingga tercipta keselarasan dalam perencanaan di semua tingkatan.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).



4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan informasi, statistik, dan infrastruktur komunikasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan inovatif.
5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global, termasuk tantangan dan peluang di era digitalisasi, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, berbasis teknologi, dan berdaya saing.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan, khususnya dalam pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, Dasar landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai pelayanan yang menjadi tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Gambaran pelayanan ini mencakup tugas dan fungsi utama dinas, sumber daya yang tersedia termasuk pegawai dan sarana prasarana, capaian kinerja yang telah dicapai hingga saat ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapi untuk



mengembangkan pelayanan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik. Fokus utama adalah pada pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, layanan data dan statistik yang akurat, serta pengembangan literasi digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berkelanjutan.. Menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan perencanaan di tingkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini secara mendalam menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam rentang waktu lima tahun. Perumusan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.. Membahas tentang proses perumusan visi dan misi jangka menengah selama lima tahun, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta berbagai isu strategis yang telah diidentifikasi. Setiap sasaran yang ditetapkan kemudian dilengkapi dengan strategi dan kebijakan yang dirancang secara spesifik. Strategi dan kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dan acuan utama untuk memastikan upaya pencapaian sasaran dapat dilakukan secara efektif dan berhasil.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUASN.

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan disertai dengan indikator kinerja, target kelompok sasaran, serta alokasi pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaannya. Menjelaskan hubungan antara Renstra Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Hubungan ini tercermin melalui indikator kinerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dan selaras dengan tujuan serta sasaran RPJMD. Selain itu, bab ini juga menguraikan indikator kinerja yang secara langsung menggambarkan capaian yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan harapan atas Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Keberadaan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Diskominfo diatur lebih rinci dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Diskominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertindak sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Kepala Dinas berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung tercapainya agenda-agenda prioritas pembangunan daerah. Agenda tersebut dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, yang menjadi acuan perencanaan bagi seluruh perangkat daerah.

Diskominfo berupaya berperan aktif dalam mengelola infrastruktur komunikasi, layanan informasi, dan pengelolaan data statistik yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi. Dengan menjalankan fungsi utamanya dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data dan digitalisasi pelayanan publik, Diskominfo berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 yang mengatur uraian tugas unit kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pendukung dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini berfungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Diskominfo;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Diskominfo; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan di atas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

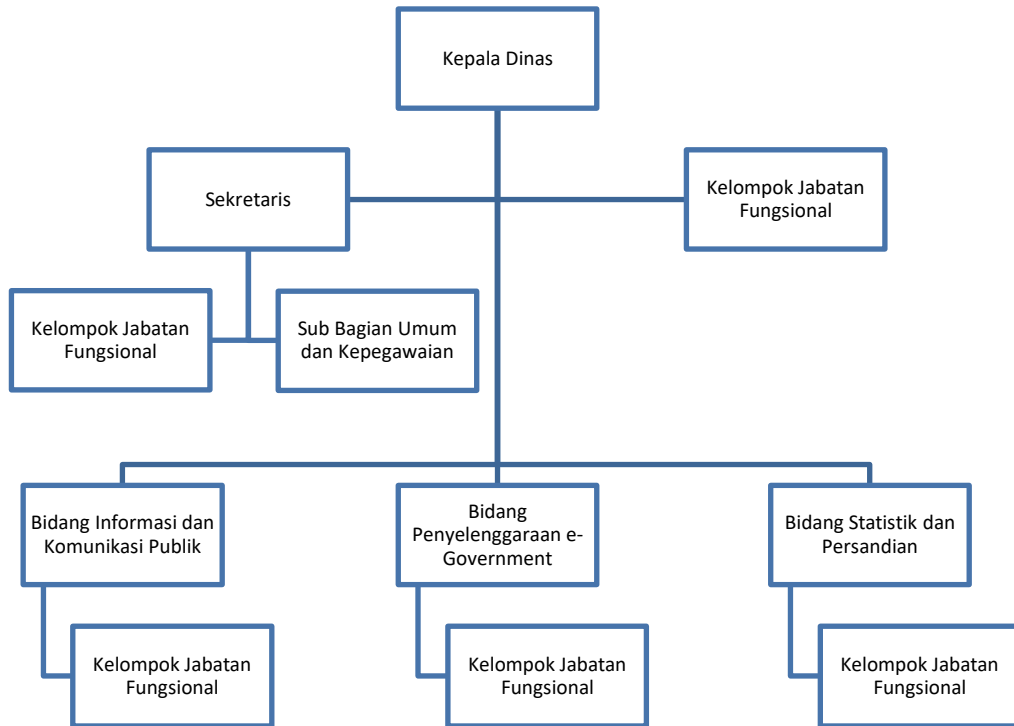
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional;

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program dan kebijakan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan para Kepala Bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya. Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas



Penjelasan seluruh unsur pembentuk struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik serta rincian tugas dan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Diskominfotik;



- b. koordinasi kegiatan Diskominfo;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Diskominfo;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Diskominfo.

Sekretariat membawahi:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Diskominfo;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Diskominfo;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier,



- pengembangan sistem merit,
- g. pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
 - h. melakukan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Diskominfotik;
 - i. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Diskominfotik;
 - j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan



- komunikasi publik;
- c. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Diskominfo.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

III. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan *e-government*.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan *e-government*;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan *e-government*;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *e-government*;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penyelenggaraan *e-government*; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Diskominfo.

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* membawahi Kelompok Jabatan Fungsional,

IV. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas



menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang statistik dan persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Diskominfo.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.b Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat hingga bidang-bidang teknis seperti Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Penyelenggaraan e-Government, serta Bidang Statistik dan Persandian, memiliki kapabilitas yang sesuai di bidang masing-masing. Sumber daya aparatur Diskominfo berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan komunikasi, informatika, dan statistik daerah secara optimal, terukur, dan akuntabel .



Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik per Januari 2025 berjumlah 27 orang terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi aparatur Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Ruang	Jumlah (Orang)
Pembina Madya	IV/D	0
Pembina Utama Muda	IV/C	1
Pembina Tk. I	IV/B	1
Pembina	IV/A	0
Penata Tk. I	III/D	4
Penata	III/C	1
Penata Muda Tk. I	III/B	6
Penata Muda	III/A	9
Pengatur Tk. I	II/D	3
Pengatur	II/C	1
Pengatur Muda Tk. I	II/B	0
Pengatur Muda	II/A	0
Juru Tk I	I/D	0
Juru	I/C	0
Juru Muda Tk. I	I/B	0
Juru Muda	I/A	0
PPPK	IX	13
Jumlah		39 Orang

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki total sumber daya aparatur sebanyak 39 orang yang terdiri dari berbagai golongan dan jabatan. Komposisi ini mencerminkan keberagaman tingkat keahlian dan tanggung jawab di antara



para pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Pada golongan IV, terdapat 1 orang di masing-masing jabatan Pembina Muda (IV/C) dan Pembina Tk. I (IV/B), sementara jabatan Pembina Madya (IV/D) dan Pembina (IV/A) tidak memiliki pegawai. Jumlah ini mencerminkan keterbatasan sumber daya di tingkat golongan tertinggi, yang biasanya memiliki peran strategis dalam organisasi.

Golongan III menjadi salah satu kategori dengan jumlah pegawai yang signifikan. Terdapat 4 orang pada jabatan Penata Tk. I (III/D), 1 orang pada jabatan Penata (III/C), serta masing-masing 6 orang pada jabatan Penata Muda Tk. I (III/B) dan 9 orang di jabatan Penata Muda (III/A). Kelompok ini mencakup pegawai dengan peran teknis yang menjadi tulang punggung operasional dinas.

Golongan II memiliki 3 orang di jabatan Pengatur Tk. I (II/D) dan 1 orang di jabatan Pengatur (II/C), sementara jabatan Pengatur Muda Tk. I (II/B) dan Pengatur Muda (II/A) tidak memiliki pegawai. Sebaliknya, golongan I, yang umumnya mencakup tenaga pendukung, tidak memiliki sumber daya sama sekali.

Selain itu, terdapat 13 pegawai yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memperkaya komposisi tenaga kerja di luar sistem golongan konvensional. Kehadiran PPPK menunjukkan keberagaman sistem kepegawaian yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara fleksibel.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2025 dengan latar belakang



pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	P N S: 25 Orang	S2 : 1 Orang
		S1/D4 : 21 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 2 Orang
2	Tenaga PPPK: 13 Orang	S1/D4 : 8 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 3 Orang
		SMP : Orang
	SD : Orang	
Jumlah Personil		39 Orang

Dari total 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang memiliki kualifikasi pendidikan S2, 20 orang berpendidikan S1 atau D4, 2 orang lulusan D3, dan 2 orang merupakan lulusan SMA atau SMK. Selain itu, terdapat pula 2 orang tenaga PPPK dengan latar belakang pendidikan 8 orang lulusan S1, 2 orang lulusan D3 dan 3 orang lulusan SMA/SMK.

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada Diskominfotik didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan tenaga PPPK berdasar kelamin.

Tabel 2. 3



Tabel 2. 3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	16	10
PPPK	6	7
Jumlah	22	17

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menunjukkan keberagaman dalam aspek gender, dengan total 39 pegawai yang terdiri atas 16 laki-laki dan 10 perempuan. Sementara itu, dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat 6 laki-laki dan 7 perempuan.

Berdasarkan data ini, terlihat bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepegawaian masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menjadi refleksi penting dalam kaitannya dengan manajemen pengarusutamaan gender (PUG) yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender di semua lini, termasuk di sektor pemerintahan. PUG menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap peluang pengembangan karir dan kapasitas profesional.

Upaya peningkatan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi perempuan di jabatan-jabatan strategis, baik di tingkat PNS maupun PPPK. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas yang inklusif gender menjadi langkah penting untuk memberikan peluang yang setara bagi perempuan dalam mengembangkan kompetensi mereka. Komposisi saat ini memberikan peluang besar untuk merumuskan kebijakan dan program yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam mendukung visi dan misi organisasi. Dengan menerapkan prinsip PUG, Dinas



Komunikasi Informatika dan Statistik dapat menjadi teladan dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua pegawai.

2.1.b.ii Sumber Daya Aset

Kinerja organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki hubungan yang erat dengan dukungan sumber daya aset, terutama sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, teknologi informasi yang mutakhir, dan fasilitas pendukung lainnya, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dukungan sumber daya aset ini mendorong pelaksanaan tugas berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan efektif, sehingga berdampak positif pada pencapaian target organisasi. Selain itu, fasilitas kerja yang baik juga mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap loyalitas serta dedikasi dalam mendukung tujuan organisasi.

Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan dan produk yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Fasilitas yang baik memungkinkan proses operasional berlangsung lancar sekaligus mengurangi risiko gangguan, terutama dalam mendukung tugas strategis seperti penyediaan informasi publik, pengembangan teknologi komunikasi, dan pengelolaan data statistik.

Keberadaan alat dan teknologi yang tepat sangat mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelayanan publik serta administrasi perkantoran yang



efisien. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan standar menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas.

Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan yang berbasis kompetensi, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung visi dan misi dinas dalam memperkuat transformasi digital serta pengelolaan statistik yang andal di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	honda PCX	3	unit	2021
2	mesin bor tangan	1	unit	2021
3	mesin gergaji besi	1	unit	2021
4	lemari kayu	1	unit	2021
5	CCTV	3	unit	2021
6	mesin absensi	1	unit	2021
7	mesin pemotong rumput	1	unit	2021
8	cabl	17	unit	2021
9	tripod camera	2	unit	2021
10	camera digital	1	unit	2021
11	video conference	2	unit	2021
12	clip on	1	unit	2021
13	handy talky (HT)	12	unit	2021
14	p.c. Unit	3	unit	2021
15	laptop	2	unit	2021
16	HDMI NETLINE	1	unit	2021
17	monitor	3	unit	2021
18	scanner	2	unit	2021
19	peralatan jaringan lain-lain	2	unit	2021
20	peralatan komputer lainnya (mikro SDXC)	2	unit	2021
21	peralatan komputer lainnya (LOGITECH)	1	unit	2021
22	alat tenis meja	1	unit	2021
23	alat penyimpan perlengkapan kantor lainnya	1	unit	2022



No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
24	peralatan komputer lainnya (aplikasi VMIX)	1	unit	2022
25	video switcher	1	unit	2022
26	switcher/menara antena lain-lain	1	unit	2022
27	layar proyektor	2	unit	2022
28	LCD/projector/infocus	1	unit	2022
29	camera video	2	unit	2022
30	camera digital		unit	2022
31	tanah bangunan tower desa tiangau	324	meter	2022
32	tanah bangunan tower desa air bini	400	meter	2022
33	tanah lahan tower desa sunggak		meter	2022
34	tanah lahan tower desa landak		meter	2022
35	tanah lahan tower desa keramut	210	meter	2022
36	tanah lahan tower desa genting pulur	400	meter	2022
37	tanah lahan tower desa tarempa barat daya	400	meter	2022
38	tanah lahan tower desa liuk	400	meter	2022
39	tanah lahan tower desa munjan (pemutus)	400	meter	2022
40	tanah lahan tower desa bayat	400	meter	2022
41	tanah lahan tower desa mengkait	225	meter	2022
42	tanah lahan tower desa rewak	400	meter	2022
43	gergaji chain saw	1	unit	2023
44	alat kantor lainnya lain-lain	1	unit	2023
45	alat rumah tangga lainnya (home use) lain-lain	1	unit	2023
46	peralatan studio audio lain-lain	2	unit	2023
47	peralatan studio video dan film lain-lain	3	unit	2023
48	alat studio lain-lain	4	unit	2023
49	personal computer	2	unit	2023
50	photo and film equipment lain-lain	1	unit	2023
51	peralatan jaringan lain-lain	2	unit	2023

2.1.c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik secara umum mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi penting terkait penyediaan layanan informasi, komunikasi, dan pengelolaan statistik secara efektif, efisien, dan akuntabel.



Sebagai bagian integral dalam struktur pemerintahan daerah, Diskominfo memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengelola, serta mengawasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan data statistik, dan penyebaran informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kinerja pelayanan ini melibatkan berbagai proses, mulai dari pengembangan infrastruktur TIK, penyediaan layanan komunikasi publik, hingga pengelolaan data statistik yang akurat dan dapat diakses.

Dalam perspektif organisasi, kinerja pelayanan Diskominfo tidak hanya bergantung pada prosedur dan sistem yang digunakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, koordinasi internal antar unit, serta penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran proses administrasi dan pelayanan publik. Pemanfaatan TIK yang optimal dapat meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai entitas yang mengelola informasi publik dan statistik, Diskominfo diharapkan dapat menciptakan sistem yang responsif, akurat, dan transparan, serta mampu mengantisipasi dan menyelesaikan tantangan dalam penyediaan layanan informasi dan komunikasi secara efektif.

Kinerja pelayanan yang optimal tidak hanya mendukung kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi, inovasi, dan teknologi modern, Diskominfo memiliki peran strategis dalam



mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik pada periode 2021-2026, yaitu:

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	58	59	60	62	65	67	-	55,35	72,34	72,34	-	-						
2	Nilai SAKIP	-	-	-	60	61	62	63	64	65	67,02	67,3	72,7	69,06	-	-						
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-						
4	Persentase Desa yang Terjangkau Akses Jaringan Telekomunikasi	-	-	-	92,59%	96,30%	100%	100%	100%	100%	92,56%	96,3%	100%	100%	-	-						
5	Persentase Desa yang Masih Blank Spot Terselasaikan	-	-	-	42,86%	71,43%	100%	100%	100%	100%	42,86%	71,43%	100%	100%	-	-						

6	Nilai Indeks SPBE	-	-	-	2,51	2,53	2,55	2,58	2,61	2,63	-	1,85	2,51	3,04	-	-						
8	Nilai Keterbukaan Informasi Publik				83	84	85	86	87	88	80,91	81,40	91,80	92,21	-	-						
9	Persentase OPD yang Memenuhi Standar Data Indonesia (SDI)				47,62%	52,38%	57,14	61,90%	66,67%	71,43%	47,62%	52,38%	66,67%	100%	-	-						
10	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				(80) Tidak Layak	(175) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(200) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(240) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(290) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	(320) Cukup Baik	-	(198) Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar										



Pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah dengan berbagai target strategis. Dalam aspek reformasi birokrasi, nilai reformasi birokrasi direncanakan meningkat dari 62 pada tahun 2025 menjadi 67 pada tahun 2026. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga diupayakan untuk terus meningkat, dengan target nilai 65 pada tahun 2026. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan menjadi prioritas setiap tahunnya, mencerminkan komitmen pada akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam penyediaan akses telekomunikasi, persentase desa yang terjangkau jaringan telekomunikasi diproyeksikan mencapai 100% pada tahun 2025 dan dipertahankan hingga 2026, bersamaan dengan penyelesaian wilayah blank spot yang ditargetkan tuntas pada tahun yang sama. Pengembangan digitalisasi terus dioptimalkan melalui peningkatan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 2,58 pada tahun 2025 menjadi 2,63 pada tahun 2026, dengan pemenuhan aspek SPBE mencapai 87,5% pada tahun 2026.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu fokus utama, dengan nilai indeks yang ditargetkan meningkat dari 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2026. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memenuhi Standar Data Indonesia (SDI) diharapkan mencapai 71,43% pada tahun 2026, menggambarkan pengelolaan data yang semakin baik. Dalam hal keamanan informasi, peningkatan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) direncanakan mencapai status "cukup baik" dengan skor 320 pada tahun 2026, mencerminkan penguatan kerangka kerja keamanan



informasi yang lebih komprehensif.

Setiap langkah ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah																				
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																				

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																				



2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal, yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengelolaan teknologi informasi, statistik, dan keamanan data, sehingga membatasi kemampuan operasional dinas dalam memberikan pelayanan berbasis TIK.
2. Masih adanya keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan telekomunikasi dan perangkat keras yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
3. Alokasi anggaran yang belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk pengadaan infrastruktur baru maupun peningkatan kapasitas SDM.
4. Kurangnya sinergi antara unit-unit kerja dalam pelaksanaan program berbasis TIK, yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelayanan.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu:



1. Beberapa desa masih berada dalam kondisi blank spot, sehingga menghambat penyediaan layanan digital secara merata.
2. Perubahan regulasi terkait tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang sering kali menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian kebijakan operasional.
3. Rendahnya tingkat literasi digital di beberapa wilayah, yang menghambat pemanfaatan layanan berbasis teknologi oleh masyarakat.
4. Tantangan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan investasi dan adaptasi yang berkelanjutan.

2. Peluang

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Adanya kemajuan teknologi memungkinkan penerapan sistem berbasis cloud, big data, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan pengambilan keputusan.
2. Fokus pada peningkatan nilai indeks SPBE melalui optimalisasi infrastruktur digital, integrasi sistem pelayanan, dan pengembangan kebijakan terkait, yang telah ditargetkan meningkat dari 2,58 (2025) menjadi 2,63 (2026).
3. Penyelesaian 100% wilayah blank spot yang direncanakan pada tahun 2025 memberikan peluang perluasan akses layanan digital hingga ke desa-desa terpencil.



4. Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung transformasi digital menjadi katalis dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas berbasis TIK.
5. Adanya peluang kerja sama dengan sektor swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan layanan digital secara lebih efisien

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Diskominfo memberikan gambaran jelas mengenai fokus pembangunan berbasis TIK yang perlu diprioritaskan. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada dan mengatasi hambatan internal serta eksternal, Diskominfo dapat menjadi motor penggerak transformasi digital di Kabupaten Kepulauan Anambas, mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.



2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan menghadapi berbagai isu strategis yang memengaruhi kinerja organisasi. Isu-isu tersebut mencakup dinamika internal maupun eksternal yang dapat berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengelolaan tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan sekitar menjadi hal penting untuk menjaga kinerja yang optimal serta memenuhi harapan masyarakat.

Isu strategis yang dihadapi meliputi faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan pesat teknologi informasi, regulasi baru, dan dinamika ekonomi yang memengaruhi pengelolaan daerah. Selain itu, faktor internal seperti kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi, dan kondisi infrastruktur digital juga memiliki pengaruh signifikan. Sebagai contoh, perubahan alokasi anggaran atau kebijakan fiskal dapat berdampak pada distribusi sumber daya, sementara tantangan internal, seperti kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dan modernisasi teknologi, dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

Dengan memahami dan merespons setiap isu strategis melalui langkah-langkah yang inovatif, adaptif, dan terukur, pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, dan statistik dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat serta mampu menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Pendekatan yang tepat bertujuan untuk memastikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



2.2.a Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai permasalahan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam pengelolaan informasi, komunikasi, serta statistik yang mendukung transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data. Permasalahan ini muncul seiring dengan dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berkembang, yang dapat memengaruhi kemampuan dalam menyediakan layanan informasi yang efisien dan relevan untuk mendukung pembangunan daerah.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, pengelolaan data statistik yang akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan, serta penyediaan infrastruktur digital yang andal. Penyusunan kebijakan yang berbasis data dan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Di masa mendatang, tantangan akan semakin kompleks dengan adanya fluktuasi ekonomi global, perubahan regulasi yang dinamis, serta kebutuhan akan integrasi data yang lebih baik untuk mendukung pemerataan pembangunan. Untuk menghadapi hal ini, penting untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan statistik, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas teknologi. Dengan pendekatan ini, Diskominfotik dapat memastikan pengelolaan informasi dan data yang mendukung stabilitas pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.



1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas berfokus pada pengelolaan informasi dan penyampaian komunikasi publik yang transparan, akurat, dan efektif. Beberapa permasalahan utama meliputi:

- Peningkatan Literasi Informasi Masyarakat

Literasi informasi masyarakat, terutama di wilayah terpencil, masih rendah, sehingga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

- Mis-informasi dan Informasi Negatif

Penyebaran berita palsu menjadi isu strategis, dengan tantangan dalam membangun sistem deteksi dini untuk memverifikasi informasi secara cepat dan tepat sebelum menyebar luas.

- Optimalisasi Media Sosial dan Digital

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik belum sepenuhnya maksimal, dengan kendala seperti:

1. Minimnya strategi komunikasi yang terarah untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat.
2. Keterbatasan alat analitik untuk mengukur efektivitas penyampaian informasi melalui media digital.



2. Bidang Penyelenggaraan *e-Government*

Bidang Penyelenggaraan *e-Government* memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Tantangan yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan Infrastruktur Digital

Infrastruktur digital di Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi kendala, seperti cakupan jaringan yang terbatas di wilayah terpencil dan kualitas jaringan yang belum optimal.

- Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

Sistem informasi antarorganisasi pemerintah daerah masih belum terintegrasi sepenuhnya, yang menyebabkan duplikasi data dan proses administrasi yang lambat.

3. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian bertugas menyediakan data yang akurat dan menjaga keamanan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Beberapa tantangan utama meliputi:

- Pengembangan SDM di Bidang Statistik dan Persandian

Ketersediaan tenaga ahli di bidang statistik dan persandian masih terbatas, sehingga diperlukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur.

- Keamanan Informasi



Ancaman terhadap keamanan informasi, termasuk serangan siber, menjadi perhatian utama dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah daerah.

2.2.b Isu Strategis

Selanjutnya, untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	1. Tantangan geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersebar berupa pulau-pulau kecil.	Penyebaran penduduk yang terpisah-pisah di daerah pesisir.
		2. Pembangunan Infrastruktur TIK belum merata dan belum bisa mengcover wilayah pulau-pulau kecil.	Besarnya investasi infrastruktur dibandingkan jumlah konsumen yang dilayani.
			Kurangnya akses jalan dan listrik di wilayah terpencil.
		Tidak adanya kewenangan daerah dalam suburusan telekomunikasi.	
2	Implementasi SPBE	Minimnya sinergitas dan kolaborasi stakeholder terkait	Kurangnya Literasi terkait SPBE.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Struktur Organisasi belum mengakomodir kebutuhan organisasi secara optimal	Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja Belum terpenuhi	Formasi jabatan yang tersedia/dibuka tidak terisi
			Peningkatan kompetensi pegawai perlu ditingkatkan
4	Pemenuhan sarana dan prasarana	Kerurangan sarana dan prasarana kerja baik utama maupun pendukung	Keterbatasan anggaran
5	Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1. kurangnya kualitas dan kuantitas SDM TIK yang kompeten.	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
			Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi TIK.
6	Dokumentasi dan Publikasi	1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk peliputan.	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas dokumentasi dan publikasi.
		2. Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang jurnalistik dan pembuatan konten.	Minimnya pelatihan/diklat dalam bidang jurnalistik.
		3. Tidak sesuai dengan kebutuhan dinas berdasarkan tugas dan fungsi.	Kurangnya pengelolaan yang optimal terhadap rekrutmen dan pengembangan SDM.
7	Peran Statistik Sektoral yang Belum Optimal	1. Data statistik sektoral belum sepenuhnya mengacu kepada Prinsip Satu Data Indonesia (SDI).	Belum Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kurangnya kesadaran produsen data untuk mencatat dan melaporkan data statistik sektoral.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Pemanfaatan data statistik sektoral masih rendah.	Data sektoral bersifat dinamis dan tidak terstandar.
		3. Kurangnya pengembangan kualitas SDM	Masih Kurangnya Kompetensi SDM yang sesuai dengan Kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi
		4. Anggaran	Kurangnya dukungan anggaran, sehingga program yang diusung masih terbatas
8	Pengamanan Aplikasi dan Informasi	1. Tingginya risiko dan kerawanan keamanan informasi.	Kurangnya keahlian SDM di bidang keamanan informasi dan persandian.
			Belum tersedianya fasilitas pendukung keamanan informasi.
		2. Belum optimalnya pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.	Keterbatasan peralatan utama persandian. Lemahnya kepedulian terhadap pentingnya keamanan informasi dan persandian.
			Kurangnya pedoman teknis dan roadmap pengembangan pengamanan persandian.
		3. Kurangnya jumlah SDM	Rekomendasi Dari Badan Siber dan Sandi Negara selaku instansi pembina Keamanan Siber belum terakomodir dalam Rekrutmen Pegawai.
		4. Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Kesempatan untuk mengikuti diklat dan pelatihan Persandian Terbatas



Tabel di atas mengelompokkan masalah berdasarkan aspek yang terkait, menyoroti akar masalah yang mendasarinya, dan memberikan gambaran umum mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3. 1. Tujuan Renstra PD

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam misi ke-3 sebagai berikut:

- Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif

Diskominfotik tidak hanya berperan dalam mendukung reformasi birokrasi, tetapi juga dalam memperkuat pembangunan di berbagai sektor melalui optimalisasi teknologi informasi, komunikasi, dan statistik.

Sebagaimana tercantum dalam Misi ke-3 fokus Diskominfotik pada reformasi birokrasi. Dengan mengintegrasikan sistem informasi, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Diskominfotik memastikan pengelolaan data dan informasi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Optimalisasi teknologi informasi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dengan peran yang terintegrasi terhadap setiap misi, Diskominfotik tidak hanya menjadi motor penggerak



transformasi digital di Kepulauan Anambas, tetapi juga menjadi katalis dalam menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Komitmen terhadap inovasi teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan pengelolaan data berbasis bukti menjadi landasan utama dalam mewujudkan visi besar daerah ini.

Tabel. 3.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, dan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi digital masyarakat rendah. - Kurangnya akses masyarakat terhadap pelatihan teknologi dan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya infrastruktur teknologi di wilayah terpencil. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah pusat untuk program literasi digital. - Potensi kolaborasi dengan sektor swasta untuk pelatihan teknologi.
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan jaringan telekomunikasi belum merata di wilayah terpencil. - UMKM lokal kesulitan mengakses pasar digital. 	<ul style="list-style-type: none"> - Geografi kepulauan yang sulit dijangkau. - Biaya investasi tinggi untuk infrastruktur telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program Universal Service Obligation (USO) dari pemerintah pusat. - Potensi pemanfaatan teknologi nirkabel berbasis satelit.
Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem informasi antar-OPD belum terintegrasi dengan baik. - Proses pengelolaan data masih manual di beberapa sektor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan sistem digital. - Keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat diadopsi. - Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung



Misi	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			reformasi birokrasi.
Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none">- Informasi destinasi wisata belum terpublikasi secara optimal.- Pemantauan sumber daya maritim kurang terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya SDM yang kompeten dalam pembuatan konten promosi digital.- Belum adanya platform digital terpadu untuk pariwisata dan maritim.	<ul style="list-style-type: none">- Potensi kerja sama dengan komunitas teknologi untuk pengembangan aplikasi.- Keberadaan sumber daya wisata dan maritim yang menarik.
Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanganan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">- Akses layanan kesehatan dan pendidikan daring belum optimal.- Data sosial-ekonomi masyarakat kurang akurat dan terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none">- Infrastruktur teknologi yang belum memadai di daerah terpencil.- Kurangnya pelatihan bagi petugas dalam memanfaatkan teknologi.	<ul style="list-style-type: none">- Kemajuan teknologi telemedicine dan e-learning.- Adanya program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan berbasis data.

3.2 Sasaran Renstra

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Renstra Kemenkominfo) 2020-2024 menjadi pedoman nasional dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satu fokus utama dari Renstra Kemenkominfo adalah pengembangan infrastruktur TIK yang merata, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan digital. Program strategis seperti pengembangan Palapa Ring dan penyediaan akses internet di fasilitas layanan publik, seperti sekolah dan puskesmas, menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat



mendapatkan akses terhadap layanan berbasis teknologi.

Renstra Kemenkominfo juga menitikberatkan pada percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta mendorong penggunaan data yang terintegrasi melalui inisiatif Satu Data Indonesia (SDI). Di samping itu, pengembangan kapasitas SDM melalui program Digital Talent Scholarship dan kampanye literasi digital secara masif menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memiliki kompetensi yang diperlukan dalam era digital.

Komitmen Kemenkominfo terhadap penguatan ekosistem digital juga tercermin dari upaya mendorong pengembangan ekonomi berbasis digital. Dukungan terhadap pelaku UMKM melalui pelatihan pemasaran digital, penyediaan platform e-commerce, dan peningkatan keamanan siber menjadi elemen penting dalam strategi ini. Dengan mengintegrasikan berbagai inisiatif tersebut, Kemenkominfo bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan daerah-daerah seperti Kepulauan Anambas dapat turut berkontribusi dalam ekosistem digital nasional.

Dari penjabaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. **Tujuan Strategis**

- Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur TIK

Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).



- Transformasi Digital

Mempercepat transformasi digital di tiga aspek utama: bisnis, masyarakat, dan pemerintahan, yang ditunjang oleh pengembangan sumber daya manusia dengan kompetensi digital.

- Transparansi dan Pengelolaan Informasi Publik

Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap informasi kebijakan pemerintah

3.3 Sasaran Strategis

- Cakupan Infrastruktur

1. Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar (broadband) yang cepat dan terjangkau.
2. Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.
3. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional.

- Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK

1. Meningkatkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam sektor ekonomi dan bisnis.
3. Mendukung implementasi digitalisasi pemerintah.

- Masyarakat Cerdas Digital

1. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital melalui peningkatan literasi dan kesadaran teknologi.

- Pengelolaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi



3. 4 Arah Kebijakan:

- Pembangunan Infrastruktur TIK

Fokus pada penyediaan konektivitas di wilayah non-komersial melalui proyek seperti Palapa Ring, BTS di wilayah terpencil, dan penyediaan akses internet untuk layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.

- Digitalisasi Pemerintahan (SPBE)

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

- Peningkatan Kompetensi Digital SDM

Melalui program seperti Digital Talent Scholarship untuk membangun talenta digital dalam mendukung ekosistem ekonomi digital dan e-government.

- Komunikasi Publik

Pengelolaan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan pemerintah dan upaya menangkal berita hoaks serta narasi negatif yang merugikan pembangunan nasional

- **Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa RTRW merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.



Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan



ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.



Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

Selanjutnya, keterkaitan antar RTRW dan rencana pembangunan jangka menengah daerah diejawantahkan kedalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui bidang-bidang yang ada. Dalam bidang Informasi dan Komunikasi Publik, peran utama terletak pada penyampaian informasi terkait tata ruang kepada masyarakat. Informasi yang transparan mengenai zonasi, peruntukan wilayah, dan perubahan tata ruang dapat disampaikan melalui media komunikasi yang dikelola Diskominfotik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung implementasi RTRW.

Di bidang Penyelenggaraan e-Government, Diskominfotik berkontribusi melalui pengembangan sistem berbasis elektronik untuk pengelolaan data tata ruang. Penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) memungkinkan pemerintah untuk memantau, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait tata ruang secara efisien. Selain itu, integrasi data RTRW dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendukung pembangunan yang berbasis bukti dan



memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang melalui aplikasi digital.

Sementara itu, bidang Statistik dan Persandian memainkan peran penting dalam menyediakan data sektoral yang relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan RTRW. Statistik mengenai demografi, ekonomi, dan lingkungan membantu mengukur dampak kebijakan tata ruang terhadap pembangunan daerah. Di sisi lain, keamanan data RTRW menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan informasi strategis, dengan dukungan protokol persandian yang andal.

Dengan sinergi antara RTRW dan fungsi Diskominfo, tata kelola tata ruang di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi publik yang aktif, serta integrasi data sektoral menjadi landasan kuat untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana



rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program daerah. KLHS ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial, kualitas lingkungan hidup, keadilan, dan tata kelola yang baik demi menjaga kualitas hidup lintas generasi. Analisis KLHS juga mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kapasitas alam dan masyarakat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi rendah dalam penyediaan pangan, tantangan dalam pengelolaan air bersih, dan daya tampung limbah yang terbatas, sehingga memerlukan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

KLHS mengidentifikasi delapan isu strategis utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya maritim yang optimal, peningkatan kualitas lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi prioritas untuk mendukung



pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang diberikan KLHS merupakan kebijakan prioritas seperti peningkatan infrastruktur layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih, sanitasi, dan pendidikan berkualitas yang merata. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular dan rehabilitasi ekosistem untuk menjaga daya dukung lingkungan. KLHS juga menekankan pentingnya membangun resiliensi daerah terhadap bencana dengan menggunakan pendekatan teknologi mitigasi dan infrastruktur hijau, yang menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga diarahkan untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan atau *blue economy*, dengan pariwisata sebagai salah satu motor penggerak utama. Namun, pembangunan ini harus diiringi langkah mitigasi untuk mencegah degradasi lingkungan. KLHS juga memberikan peta kerentanan wilayah untuk mengidentifikasi risiko bencana seperti angin puting beliung, gelombang pasang, banjir, longsor, dan kebakaran hutan, sehingga langkah mitigasi dapat dirancang dengan baik.

Sebagai upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), KLHS berkontribusi pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Analisis capaian indikator menunjukkan bahwa beberapa indikator telah tercapai, sementara lainnya memerlukan intervensi tambahan untuk memastikan keberhasilan implementasi. KLHS juga menyarankan skenario pembangunan, baik optimis dengan intervensi tambahan pada semua sektor, maupun mitigasi dengan fokus pada adaptasi dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan demikian, KLHS menjadi panduan strategis untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan



Anambas berorientasi pada keberlanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu dipastikan tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi alat penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Diskominfo memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi KLHS melalui bidang-bidangnya. Dalam bidang Informasi dan Komunikasi Publik, peran utama terletak pada penyampaian informasi yang transparan terkait kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami dampak lingkungan dari rencana pembangunan, seperti pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi wilayah pesisir. Selain itu, informasi yang mudah diakses dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Di bidang Penyelenggaraan e-Government, Diskominfo dapat mendukung KLHS dengan pengembangan sistem berbasis data yang terintegrasi. Teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dapat digunakan untuk memantau wilayah-wilayah dengan kerentanan ekologi tinggi, memastikan rencana pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan. Integrasi data lingkungan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik memungkinkan analisis spasial yang mendalam dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal.



Sementara itu, bidang Statistik dan Persandian berperan dalam menyediakan data sektoral yang akurat dan relevan untuk mengukur dampak pembangunan terhadap lingkungan. Data mengenai kualitas air, tanah, udara, serta perubahan penggunaan lahan sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Selain itu, keamanan data lingkungan melalui protokol persandian menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan informasi strategis terkait sumber daya alam dan kebijakan lingkungan.

Dengan sinergi di antara bidang-bidang ini, Diskominfo dapat mendukung implementasi KLHS secara efektif melalui pengelolaan informasi yang transparan, integrasi sistem berbasis teknologi, dan pengamanan data lingkungan. Langkah-langkah ini menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pengelolaan informasi, komunikasi, dan statistik daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tugas menyelenggarakan layanan telekomunikasi, penyebaran informasi publik, serta pengelolaan data dan statistik daerah, Diskominfo harus mampu menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur digital, mengelola komunikasi strategis, dan memanfaatkan data untuk mendukung prioritas pembangunan, seperti peningkatan konektivitas, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dan penguatan ekonomi digital.

Peran Diskominfo sangat strategis dalam mengintegrasikan kebijakan informasi dan komunikasi dengan kebutuhan pembangunan yang berorientasi pada keterbukaan, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam



menghadapi dinamika pembangunan daerah, berbagai isu strategis seperti konektivitas digital, keamanan data, transparansi informasi, serta literasi digital masyarakat perlu diidentifikasi dan diatasi. Hal ini memastikan bahwa setiap program yang dirancang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan daerah tetapi juga memperkuat keberlanjutan pembangunan berbasis teknologi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya informasi. Berikut adalah isu-isu strategis tersebut:

1. Peningkatan Konektivitas Digital

Konektivitas digital merupakan fondasi utama untuk mendukung berbagai layanan berbasis teknologi. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, keterbatasan akses telekomunikasi dan internet di wilayah terpencil menjadi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau dan minimnya infrastruktur telekomunikasi. Program nasional seperti BTS USO (Universal Service Obligation) dapat dioptimalkan untuk memperluas cakupan jaringan, sementara kolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi diperlukan untuk memastikan akses informasi yang merata.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Implementasi SPBE di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi kendala berupa kurangnya integrasi sistem antar-OPD dan keterbatasan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi. SPBE menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data. Diskominfo dapat mendukung dengan mengintegrasikan data lintas sektor, mengembangkan platform digital terpadu, dan meningkatkan pelatihan SDM untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem ini.

3. Transparansi dan Diseminasi Informasi Publik



Penyampaian informasi publik yang transparan dan responsif merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saat ini, penyebaran informasi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya optimal, terutama di wilayah terpencil. Diskominfo dapat mengembangkan portal informasi publik yang terintegrasi dan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif. Kampanye melawan hoaks dan disinformasi juga menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan publik.

4. Keamanan Informasi dan Data

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi di pemerintahan, risiko serangan siber terhadap data pemerintah semakin besar. Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk melindungi data dan informasi sensitif melalui pengembangan sistem persandian yang andal serta pelatihan SDM di bidang keamanan siber. Strategi ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah daerah.

5. Isu Publik dan Media

Peran media dalam menyampaikan informasi strategis sangat penting, tetapi isu-isu negatif atau hoaks sering kali mendominasi narasi publik. Diskominfo perlu memperkuat komunikasi publik dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Selain itu, pengelolaan hubungan dengan media lokal harus ditingkatkan untuk memastikan narasi positif tentang pembangunan daerah dapat tersampaikan secara luas.

6. Satu Data Indonesia (SDI)

Pengelolaan data sektoral yang terintegrasi menjadi salah satu prioritas dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Diskominfo perlu memastikan bahwa data statistik sektoral di Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Dengan data yang terintegrasi dan akurat,



pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

7. Gender dan Inklusi Digital

Pentingnya perspektif gender dalam pengelolaan teknologi dan informasi sering kali diabaikan. Diskominfo dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya memiliki akses yang setara terhadap layanan digital. Program literasi digital berbasis gender dapat dirancang untuk memberdayakan perempuan dan memastikan inklusi digital di seluruh lapisan masyarakat.

Setiap isu ini mencerminkan kebutuhan strategis yang harus dikelola oleh Diskominfo untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil, Diskominfo dapat memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berbasis teknologi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengidentifikasian isu strategis tersebut membantu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik merumuskan prioritas kerja yang efisien, memperbaiki tata kelola, meningkatkan kinerja, dan mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta memastikan pembangunan daerah berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern. Dengan fokus pada isu-isu strategis, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang efisien, transparan, dan berdaya saing.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan informasi, komunikasi, dan statistik yang strategis.



Tugas ini mencakup memastikan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang tepat, pengelolaan data yang akurat, serta penyebaran informasi publik yang efektif untuk mendukung prioritas pembangunan, seperti peningkatan layanan digital, pengelolaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, dan pemanfaatan sumber daya berbasis data yang berkelanjutan. Pembangunan yang direncanakan dengan baik membutuhkan peran Diskominfo yang mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan daerah ke dalam strategi komunikasi dan informasi yang transparan, efektif, dan efisien. Hal ini menjadikan Diskominfo salah satu pilar utama dalam memastikan tercapainya visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan keberhasilan perannya, Diskominfo perlu merancang tujuan dan sasaran organisasi yang terstruktur dan terukur. Tujuan organisasi memberikan arah strategis, sementara sasaran menjadi panduan untuk menetapkan langkah-langkah konkret dalam mencapai visi yang lebih besar. Desain yang baik memastikan bahwa setiap bidang dalam Diskominfo dapat menjalankan fungsinya secara sinergis dan fokus pada prioritas pembangunan, seperti penguatan konektivitas digital, literasi digital masyarakat, dan pengelolaan data statistik sektoral. Selain itu, tujuan dan sasaran yang jelas juga membantu organisasi meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, memperkuat koordinasi antarunit, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi dan data daerah.

Penentuan indikator tujuan dan sasaran menjadi elemen penting dalam mendukung peran strategis Diskominfo. Indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu (SMART) memungkinkan Diskominfo mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan berjalan sesuai rencana. Indikator ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan



setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian peran organisasi dalam pembangunan daerah. Dengan penetapan tujuan, sasaran, dan indikator yang jelas, Diskominfotik dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan daerah.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2029.

Tabel. 3.2 Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Per Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB
			Nilai SAKIP (Angka)	63,66	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86
2	Mewujudkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja dan inovasi pelayanan publik berbasis inovasi digital	Nilai Indeks SPBE	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Per Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survei)	Persentase (%)	75	77	80	82	85	87
2	Nilai Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE	Nilai	1,67315	1,6895	1,7113	1,72765	1,744	1,962
3	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1,75 (kurang)	1,80 (cukup)	1,95 (cukup)	2,15 (cukup)	2,35 (cukup)	2,6 (Baik)
4	Nilai Keamanan SPBE	Nilai	2,7	2,7	3,45	3,45	4,2	4,85



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan informasi, komunikasi, dan statistik daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan yang tepat. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan setiap langkah operasional agar mendukung pencapaian sasaran secara terukur dan efisien, sementara kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan berbasis teknologi dan data.

Penyusunan strategi dan kebijakan tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap sasaran, seperti peningkatan tata kelola data, penyediaan infrastruktur digital yang merata, dan pengelolaan statistik sektoral, dapat dicapai secara efektif. Dengan pendekatan yang terfokus, strategi dan kebijakan ini juga memberikan landasan bagi inovasi, penguatan literasi digital, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini mendukung keberhasilan tujuan pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital berjalan selaras dengan visi Kabupaten Kepulauan Anambas menuju masyarakat yang maju, inovatif, dan sejahtera. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel. 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pemenuhan Struktur Organisasi yang dapat mengakomodir layanan dinas	Pemenuhan Anjab dan ABK dalam pemenuhan pegawai
			Pemenuhan sarana dan prasarana
			Pemenuhan kebutuhan anggaran
			Peningkatan kompetensi pegawai
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Penguatan Sinegritas dengan Stakeholder terkait komunikasi publik	Pengembangan SDM
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana
			Kerjasama stakeholder terkait
Nilai Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Penguatan Domain kebijakan SPBE	Penyusunan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
		Penguatan Domain Tata Kelola SPBE	Penyusunan Perencanaan Strategis SPBE
			Penerapan TIK
			Optimalisasi Penyelenggara SPBE
		Penguatan Domain Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE
Penguatan Domain Layanan SPBE	Pengintegrasikan Layanan SPBE		
Terwujudnya Layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial Nasional (SSN)	Konsolidasi dan Koordinasi di Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Menyusun Pedoman Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
		Menyediakan SDM yang mempunyai dalam menginteroperabilitas data	Pengembangan SDM yang tersedia dengan mengikuti pelatihan yang diperlukan
Meningkatkan Keamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Alat dan Aplikasi Pengamanan Persandian.	Pengembangan SDM dalam penggunaan Alat dan Aplikasi Pengamanan Persandian
			Pemenuhan SDM Keamanan Siber sesuai kebutuhan.



Dengan strategi dan kebijakan yang dirancang secara terfokus, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan pendekatan yang sistematis dan efektif. Hal tersebut juga menjadi pijakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbasis akuntabilitas, inovasi, dan keberlanjutan.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam meningkatkan tata kelola informasi, komunikasi, dan statistik yang transparan, akuntabel, dan efisien, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik merumuskan sejumlah program strategis yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025–2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi, seperti peningkatan konektivitas digital, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, transparansi informasi publik, serta pengelolaan data statistik yang terintegrasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Program-program prioritas Diskominfo mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026 dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas ini. Program prioritas beserta indikator keluarannya (outcomes) dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk memastikan setiap program mencerminkan akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan fungsi Diskominfo. Kegiatan yang dipilih dirancang tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan jangka menengah, tetapi juga untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran dinas. Indikator keluaran program mencerminkan manfaat yang diperoleh kelompok sasaran secara langsung dalam jangka menengah, seperti peningkatan kualitas layanan komunikasi publik, efisiensi tata kelola data, dan transparansi dalam pengelolaan informasi.

Program-program tersebut meliputi berbagai aspek penting, seperti penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan teknologi, pengembangan sistem pemerintahan berbasis



elektronik (SPBE), serta integrasi data melalui prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Selain itu, inovasi dalam komunikasi publik dan keamanan informasi menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan tata kelola informasi yang andal. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan tercipta tata kelola informasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis teknologi.

Program-program ini juga dirancang untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan langkah-langkah strategis ini, Diskominfo berkomitmen untuk menjadi penggerak utama transformasi digital dan keterbukaan informasi demi tercapainya pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan sarana, prasarana, dan layanan administratif yang memadai. Program ini mencakup pengelolaan keuangan internal, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia guna memastikan kelancaran operasional pemerintahan daerah.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara akurat, transparan, dan efektif kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Program ini mencakup pengelolaan informasi berbasis teknologi, strategi komunikasi publik, keterbukaan informasi, manajemen krisis informasi, dan peningkatan



kapasitas SDM. Dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dan melibatkan media, program ini membantu mencegah disinformasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat citra pemerintah dan daerah, mendukung transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan publik.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika bertujuan mengembangkan dan mengelola aplikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan publik. Program ini mencakup pengembangan aplikasi pemerintahan yang mendukung administrasi berbasis data, integrasi sistem informasi antarunit kerja, serta penyediaan layanan publik digital seperti e-Government dan platform layanan masyarakat. Selain itu, pemeliharaan sistem dan keamanan siber menjadi prioritas untuk memastikan operasional aplikasi berjalan lancar dan melindungi data strategis dari ancaman siber.

Program ini juga berfokus pada peningkatan literasi digital bagi pegawai pemerintah dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi, serta inovasi teknologi berkelanjutan seperti kecerdasan buatan, big data, dan cloud computing. Dengan transformasi digital ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah akses layanan publik, mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat keamanan informasi. Program ini menjadi landasan penting dalam modernisasi pemerintahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah program yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan



menyajikan data statistik yang relevan dengan sektor-sektor strategis pemerintah. Program ini berfungsi sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Kegiatan utamanya meliputi survei sektoral, pemetaan data wilayah, integrasi sistem data lintas sektor, serta penyediaan statistik tematik yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Program ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas pengelola data melalui pelatihan teknis dan penggunaan teknologi terkini untuk memastikan kualitas, akurasi, dan keandalan data. Selain itu, penyediaan data statistik yang transparan dan dapat diakses oleh publik mendukung keterbukaan informasi, kolaborasi antar-stakeholder, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya program ini, pemerintah dapat menciptakan perencanaan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi peluang dan tantangan di setiap sektor, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan berbasis data.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi bertujuan untuk melindungi informasi strategis pemerintah dari ancaman keamanan siber dan kebocoran data. Program ini mencakup pengembangan sistem persandian yang andal, penerapan teknologi enkripsi modern, serta pengelolaan komunikasi rahasia di lingkungan pemerintahan. Fokus utamanya adalah menjamin kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi melalui mekanisme pengamanan berbasis standar nasional dan internasional. Selain itu, program ini



mengintegrasikan sistem pengamanan informasi dengan kebijakan perlindungan data untuk meminimalkan risiko gangguan dan penyalahgunaan informasi penting.

Program ini juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang keamanan informasi dan persandian, serta pengembangan perangkat teknologi yang mendukung keamanan komunikasi. Melalui kolaborasi antarinstansi dan penguatan regulasi, program ini memastikan terciptanya ekosistem keamanan informasi yang kokoh. Dengan pengelolaan persandian yang terstruktur, pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi operasional, serta melindungi data strategis yang menjadi aset vital dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mendukung tercapainya Target Renstra Diskominfo dan untuk mendukung Capaian Program, disusun Kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut terdiri dari 14 Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
10. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Uraian sub kegiatan

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.).

Tabel. 4.1 (Tabel T-C. 27.)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	Rp 5	6	Rp 7	8	Rp 9	10	Rp 11	12	Rp 13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Rp 2.250.000.000		Rp 2.480.000.000		Rp 2.710.000.000		Rp 2.880.000.000		Rp 3.150.000.000	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah				Rp 2.250.000.000		Rp 2.480.000.000		Rp 2.710.000.000		Rp 2.880.000.000		Rp 3.150.000.000	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo , dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	1	Rp 1.700.000.000	1	Rp 1.800.000.000	1	Rp 1.900.000.000	1	Rp 2.000.000.000	1	Rp 2.100.000.000	Laporan
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	0	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 120.000.000	1	Rp 120.000.000	1	Rp 150.000.000	Laporan
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3	34	Rp 100.000.000	68	Rp 150.000.000	102	Rp 180.000.000	136	Rp 200.000.000	170	Rp 250.000.000	Permohonan

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	15	15	Rp 100.000.000	30	Rp 150.000.000	50	Rp 180.000.000	80	Rp 200.000.000	100	Rp 250.000.000	Rekomendasi
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	50	50	Rp 200.000.000	80	Rp 230.000.000	110	Rp 250.000.000	140	Rp 280.000.000	170	Rp 300.000.000	Media
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	0	5	Rp 50.000.000	5	Rp 50.000.000	7	Rp 80.000.000	7	Rp 80.000.000	9	Rp 100.000.000	Orang
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				Rp 3.570.000.000		Rp 4.030.000.000		Rp 4.370.000.000		Rp 5.100.000.000		Rp 8.510.000.000	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 200.000.000		Rp 220.000.000		Rp 240.000.000		Rp 260.000.000		Rp 280.000.000	
Pengelolaan Nama Domain dan SubDomain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan SubDomain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 dokum en	1	Rp 200.000.000	1	Rp 220.000.000	1	Rp 240.000.000	1	Rp 260.000.000	1	Rp 280.000.000	Dokumen

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 3.370.000.000		Rp 3.810.000.000		Rp 4.130.000.000		Rp 4.840.000.000		Rp 8.230.000.000	
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1	Rp 30.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	Laporan
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0	1	Rp 30.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 45.000.000	1	Rp 50.000.000	Dokumen
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang di bangun dan/atau di kembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	38	40	Rp 370.000.000	42	Rp 490.000.000	46	Rp 520.000.000	51	Rp 570.000.000	56	Rp 570.000.000	Aplikasi
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah dipemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	25	25	Rp 440.000.000	25	Rp 500.000.000	25	Rp 530.000.000	26	Rp 680.000.000	27	Rp 3.560.000.000	Pemeliharaan & Peningkatan jaringan di kecamatan siantan tengah dan siantan selatan
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	29	30	Rp 2.500.000.000	31	Rp 2.750.000.000	32	Rp 3.000.000.000	33	Rp 3.500.000.000	34	Rp 4.000.000.000	Perangkat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Rp 260.000.000		Rp 260.000.000		Rp 260.000.000		Rp 260.000.000		Rp 260.000.000	

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp 260.000.000		Rp 260.000.000		Rp 260.000.000		Rp 260.000.000		Rp 260.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0	5	Rp 60.000.000	5	Rp 60.000.000	5	Rp 60.000.000	5	Rp 60.000.000	5	Rp 60.000.000	Orang
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/ atau Penyusunan Kebijakan	0	50%	Rp 60.000.000	59%	Rp 60.000.000	71%	Rp 60.000.000	82%	Rp 60.000.000	100%	Rp 60.000.000	Persentase
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	2	Rp 60.000.000	Dokumen
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1	2	Rp 80.000.000	2	Rp 80.000.000	2	Rp 80.000.000	2	Rp 80.000.000	2	Rp 80.000.000	Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Rp 235.000.000		Rp 235.000.000		Rp 235.000.000		Rp 235.000.000		Rp 235.000.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000		Rp 150.000.000	

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	0	1	Rp 35.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 35.000.000	1	Rp 35.000.000	Dokumen
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	5	Rp 115.000.000	5	Rp 115.000.000	5	Rp 115.000.000	5	Rp 115.000.000	5	Rp 115.000.000	Laporan
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 85.000.000	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 85.000.000		Rp 85.000.000	Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		Rp 6.994.000.000		Rp 7.274.000.000		Rp 7.288.000.000		Rp 7.554.000.000		Rp 7.494.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		Rp 73.000.000		Rp 73.000.000		Rp 73.000.000		Rp 73.000.000		Rp 73.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	Rp 42.000.000	4	Rp 42.000.000	4	Rp 42.000.000	4	Rp 42.000.000	4	Rp 42.000.000	Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	Laporan
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	Dokumen

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yangTelah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	Data
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan BidangUrusan yangDiampudalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Berita Acara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	Dokumen
Sinkronisasi danHarmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi danHarmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	0	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100%		Rp 5.832.500.000		Rp 6.112.500.000		Rp 6.126.500.000		Rp 6.392.500.000		Rp 6.392.500.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Rp 5.600.000.000	1	Rp 5.880.000.000	1	Rp 5.894.000.000	1	Rp 6.160.000.000	1	Rp 6.160.000.000	Orang/bulan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	1	Rp 210.000.000	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.500.000	1	Rp 2.500.000	Dokumen
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	laporan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	Laporan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Dokumen
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Laporan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Laporan
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	Dokumen
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	2	Rp 25.000.000	Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%		Rp 58.500.000		Rp 58.500.000		Rp 58.500.000		Rp 58.500.000		Rp 58.500.000	

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	5	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	Orang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000	Dokumen
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2	Rp 12.000.000	2	Rp 12.000.000	2	Rp 12.000.000	2	Rp 12.000.000	2	Rp 12.000.000	Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Perkantoran, Kebutuhan Rapat, Aktivitas Lapangan, Pelayanan Tamu, serta Perjalanan Dinas	100%		Rp 575.000.000		Rp 575.000.000		Rp 575.000.000		Rp 575.000.000		Rp 575.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1	Rp 12.000.000	1	Rp 12.000.000	1	Rp 12.000.000	1	Rp 12.000.000	1	Rp 12.000.000	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1	Rp 16.000.000	1	Rp 16.000.000	1	Rp 16.000.000	1	Rp 16.000.000	1	Rp 16.000.000	Paket

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1	Rp 55.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 55.000.000	1	Rp 55.000.000	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	1	Rp 22.000.000	1	Rp 22.000.000	1	Rp 22.000.000	1	Rp 22.000.000	1	Rp 22.000.000	Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1	Rp 425.000.000	1	Rp 425.000.000	1	Rp 425.000.000	1	Rp 425.000.000	1	Rp 425.000.000	Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	Rp 139.000.000	1	Rp 139.000.000	1	Rp 139.000.000	1	Rp 139.000.000	1	Rp 139.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	3	Rp 45.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 45.000.000	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	9	Rp 52.000.000	9	Rp 52.000.000	9	Rp 52.000.000	9	Rp 52.000.000	9	Rp 52.000.000	Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	Unit
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	Rp 17.000.000	1	Rp 17.000.000	1	Rp 17.000.000	1	Rp 17.000.000	1	Rp 17.000.000	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran dan Langganan Lainnya	100%	100%	Rp 126.000.000	1	Rp 126.000.000	1	Rp 126.000.000	1	Rp 126.000.000	1	Rp 126.000.000	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	1	Rp 65.000.000	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	1	Rp 60.000.000	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%	100%	Rp 80.000.000	1	Rp 80.000.000	1	Rp 80.000.000	1	Rp 80.000.000	1	Rp 80.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	6	Rp 60.000.000	6	Rp 60.000.000	6	Rp 60.000.000	6	Rp 60.000.000	6	Rp 60.000.000	Unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Unit
TOTAL				Rp 13.309.000.000	Rp 14.279.000.000	Rp 14.863.000.000	Rp 16.029.000.000	Rp 19.649.000.000					



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi landasan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja ini dirancang untuk memberikan gambaran jelas tentang seberapa baik visi dan misi Dinas tercapai dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam praktiknya, pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan melalui indikator outcome program pembangunan daerah maupun indikator capaian mandiri. Hal ini memungkinkan evaluasi kinerja yang terstruktur, sehingga Dinas dapat memastikan tercapainya target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Untuk mencapai indikator kinerja yang telah dirancang, Dinas mengelola berbagai program dan kegiatan yang terukur, dengan pendekatan berbasis data dan hasil (output dan outcome). Proses ini melibatkan koordinasi intensif antarunit kerja dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Setiap program yang dilaksanakan Dinas tidak hanya bertujuan menghasilkan keluaran (output) yang bermanfaat secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang mendukung keberhasilan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja ini menjadi bagian integral dalam pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, sesuai dengan amanat RPJMD.

Dalam mendukung visi besar Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menetapkan indikator kinerja jangka panjang selama lima tahun sebagai wujud komitmen untuk mencapai tujuan strategis. Indikator ini dirancang untuk mencerminkan kontribusi nyata Dinas dalam penyediaan layanan informasi, komunikasi, serta statistik yang handal dan transparan. Keberhasilan Dinas juga akan menjadi indikator pencapaian kinerja utama Kepala Daerah, sehingga memastikan



program yang dirancang tidak hanya relevan tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Komitmen Dinas ini ditunjukkan melalui pengembangan kebijakan berbasis bukti, pemanfaatan teknologi informasi modern, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, indikator kinerja Dinas juga mencakup dimensi keterbukaan informasi, pemanfaatan data statistik sektoral, dan implementasi program-program inovatif yang mendukung visi daerah. Melalui pendekatan ini, Dinas tidak hanya berperan sebagai penyelenggara layanan teknis, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Dengan indikator yang diuraikan dalam Tabel 7.1, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur, terarah, dan berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini tidak hanya membantu Dinas dalam memonitor progres pencapaian, tetapi juga memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan demikian, Dinas memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerintahan daerah yang modern, responsif, dan inklusif.



**Tabel. 4.2 Indikator Kinerja Utama Diskominfofik
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No.	Indikator Kinerja	Target Per Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai AKIP (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB
	Nilai AKIP (Angka)	63,66	65,34	67,05	68,72	70,46	71,86
2	Nilai Indeks SPBE	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55

Tabel 4.2 di atas merupakan komitmen Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



**Tabel. 4.3 Indikator Kinerja Kunci Diskominfotik
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

No.	Indikator Kinerja	Target Per Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survei)	75	77	80	82	85	87
2	Nilai Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE	1,67315	1,6895	1,7113	1,72765	1,744	1,962
3	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	1,75 (kurang)	1,80 (cukup)	1,95 (cukup)	2,15 (cukup)	2,35 (cukup)	2,6 (Baik)
4	Nilai Keamanan SPBE	2,7	2,7	3,45	3,45	4,2	4,85

Dalam membantu tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dituangkan dalam Indikator Kinerja Kunci untuk memastikan setiap unit kerja mempunyai kontribusi yang jelas dan hasil langsung dari kegiatan yang akan mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama.



BAB V PENUTUP

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas memegang peran strategis dalam mengelola informasi, komunikasi, dan statistik daerah secara terarah, transparan, dan efisien. Melalui penyusunan rencana strategis yang berfokus pada optimalisasi teknologi informasi, keterbukaan data, dan peningkatan akuntabilitas tata kelola, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik berkomitmen mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat bergantung pada kolaborasi dan koordinasi yang solid antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Dukungan berupa kebijakan yang proaktif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dalam era digital.

Dengan semangat transparansi, inovasi, dan kolaborasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas terus berkomitmen memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Tarempa, 15 September 2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK



JAPRIZAL, S.Kom., M.A.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750120 200312 1 008